

LAPORAN HASIL

**SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
TRIWULAN II
(PERIODE APRIL – JUNI TAHUN 2023)**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021**



**PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG
KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU**

JALAN AIPDA MU'AN KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB KEPAHIANG
Telp/Fax. (0732) 3930019, e-mail : pn_kepahiang@yahoo.com
KEPAHIANG- BENGKULU (39172)

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II



Disahkan di Kepahiang
Pada Hari Jumat, 27 Juni 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang



HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 197811272003121002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepahiang mengadakan survei ini.

Laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Isi survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Kepahiang, yang diambil dengan kuesioner. Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Kepahiang dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Kepahiang.

Kepahiang, 27 Juni 2023

Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II. METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	5
BAB III. INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1. Profil Responden.....	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan ..	21
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	26
BAB IV. PENUTUP.....	27
4.1. Kesimpulan.....	27
4.2. Rekomendasi	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, dengan sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu, Pengadilan juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Dan setiap masukan tersebut akan disusun menjadi Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi setiap 3 bulan.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai

diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

1.4. Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden;
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner;
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- Pengujian kualitas dan validitas data;
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Jenis Kelamin

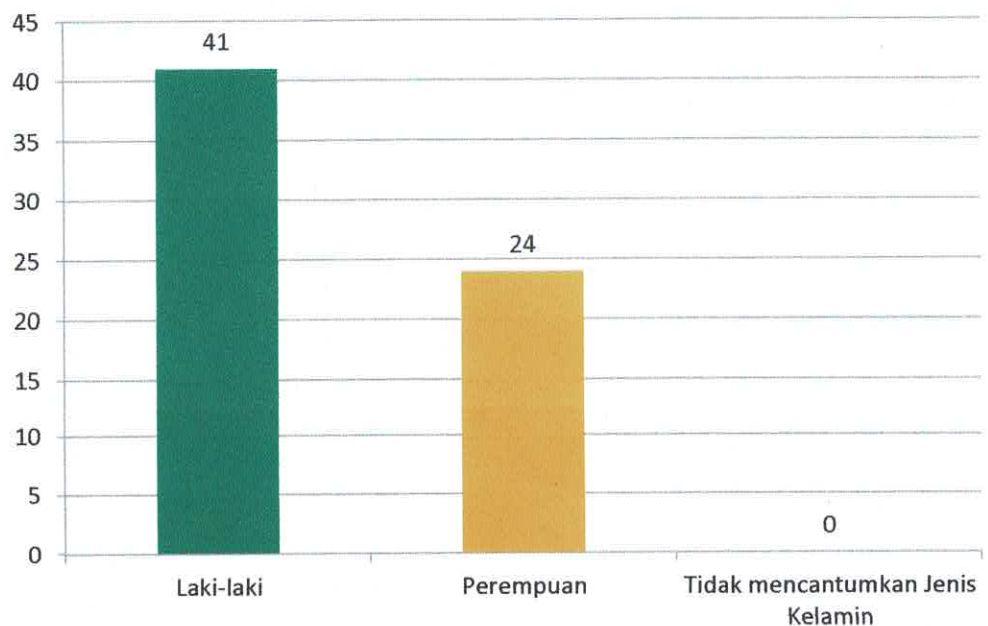
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang mayoritas adalah laki-laki sebanyak 41 orang dengan persentase 63%.

Tabel 4
Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	41	63
2	Perempuan	24	37
3	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0
Jumlah		65	100

Grafik. 1

Responden Menurut Jenis Kelamin



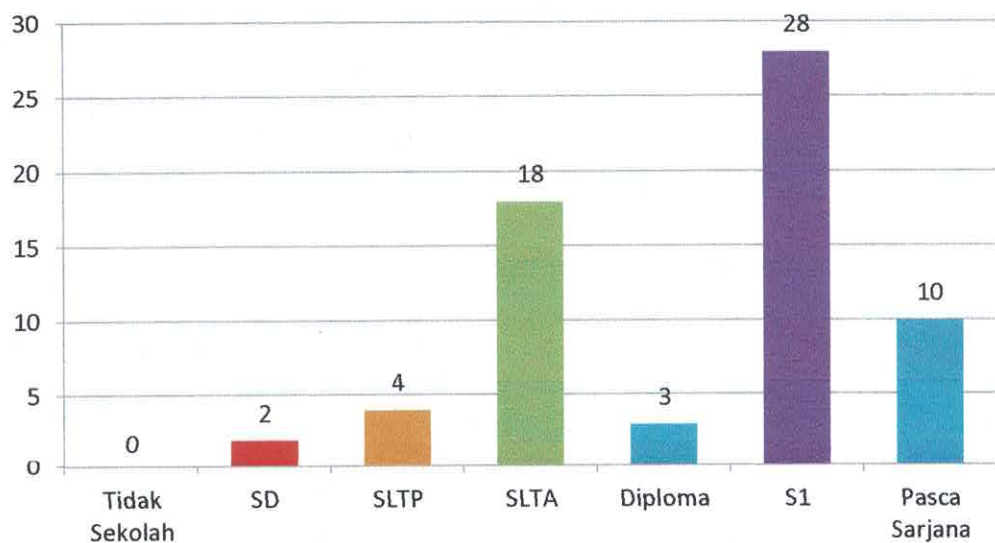
3.1.2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan S1 sebanyak 43% dan lulusan SLTA sebanyak 28%.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	2	3
3	SMP	4	6
4	SLTA	18	28
5	Diploma	3	5
6	S1	28	43
7	Pasca Sarjana	10	15
Jumlah		65	100

Grafik.2
Tingkat Pendidikan Responden



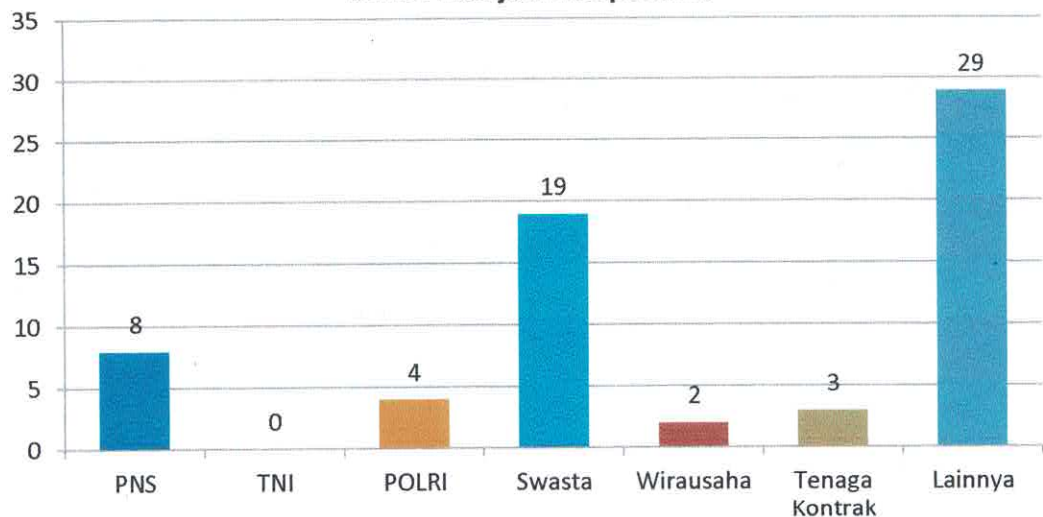
3.1.3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 45% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

Tabel 6.
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	8	12
2	TNI	0	0
3	POLRI	4	6
4	Swasta	19	29
5	Wirausaha	2	3
6	Tenaga Kontrak	3	5
7	Lainnya	29	45
Jumlah		65	100

Grafik. 3
Jenis Pekerjaan Responden



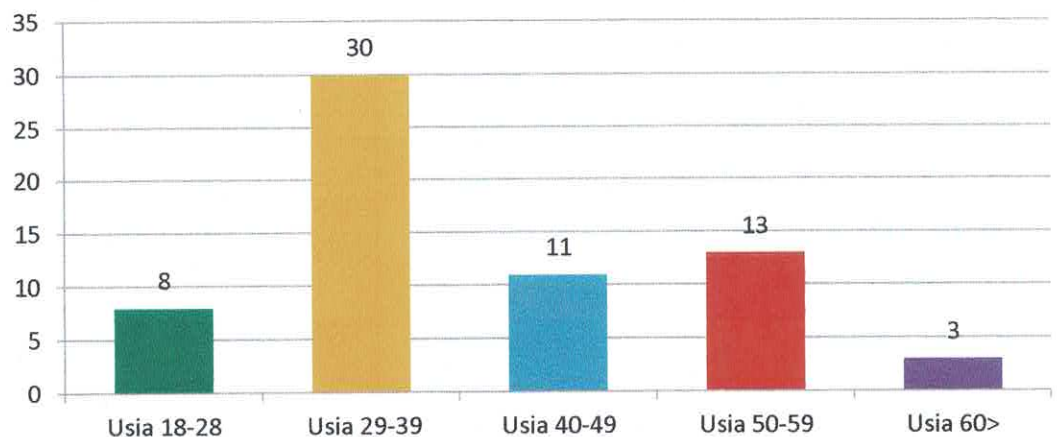
3.1.4 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun s/d 39 tahun yaitu sebanyak 46%.

Tabel 7.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	8	12
2	29-39	30	46
3	40-49	11	17
4	50-59	13	20
5	60-69	3	5
Jumlah		65	100

Grafik. 4
Usia Responden



3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

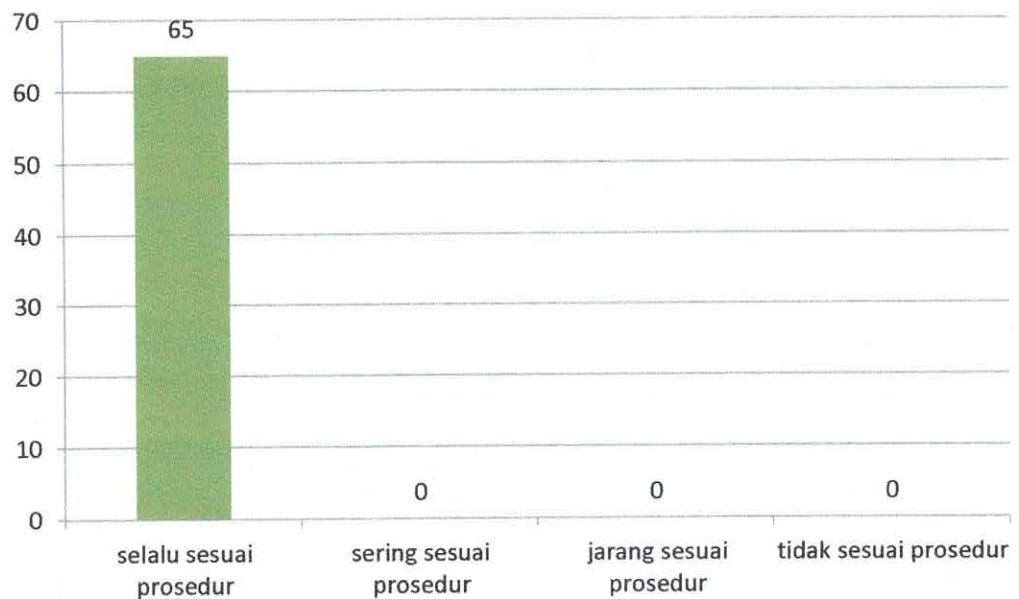
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 8
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu sesuai prosedur	4	65	100
2	sering sesuai prosedur	3	0	0
3	jarang sesuai prosedur	2	0	0
4	tidak sesuai prosedur	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 5



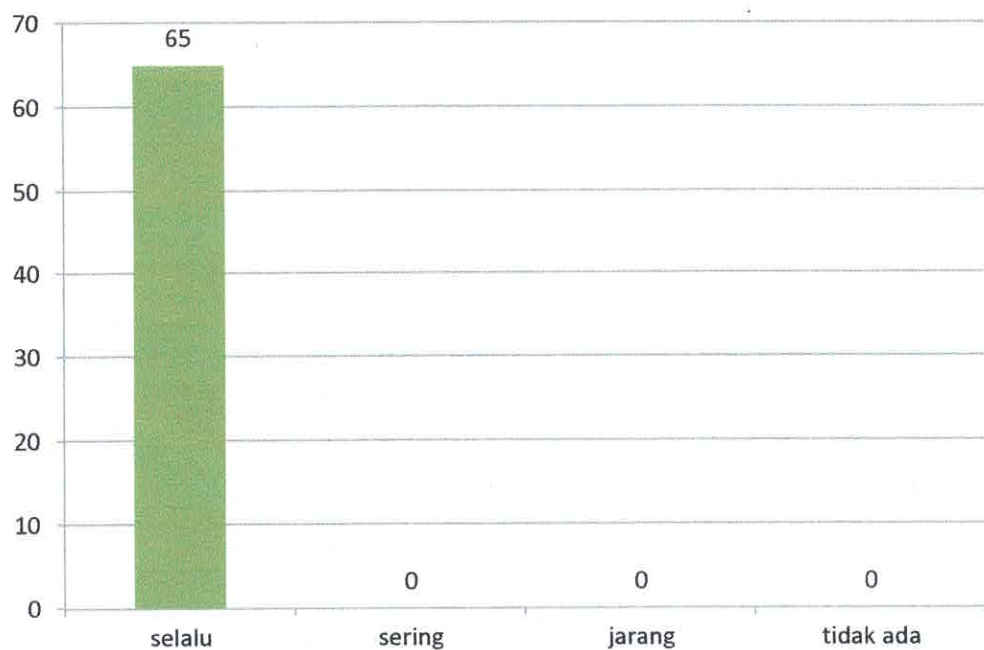
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 9
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	65	100
2	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 6



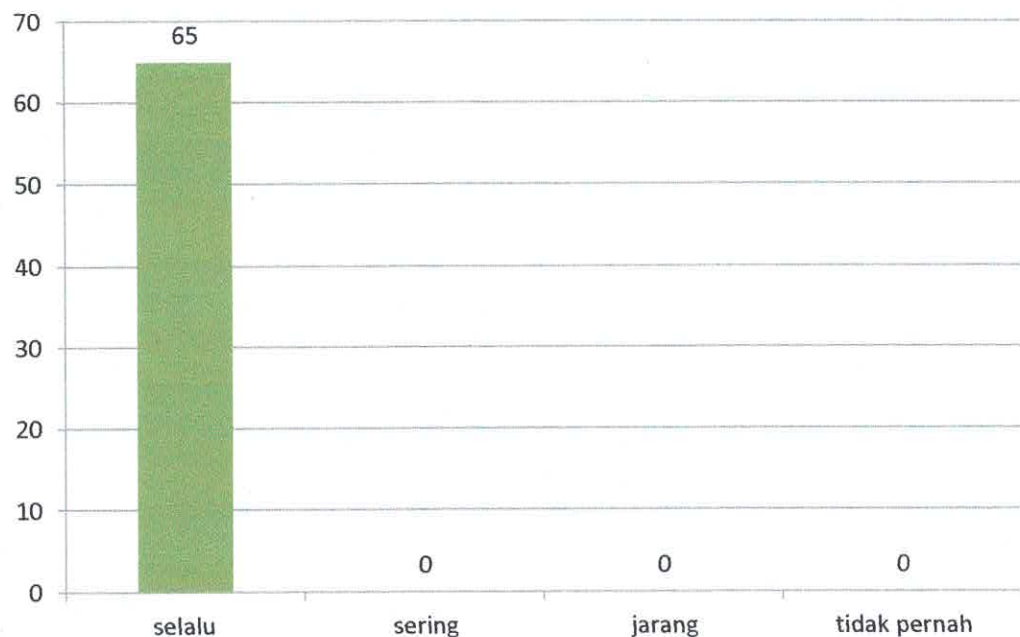
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel.10
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	65	100
2	jarang/pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 7



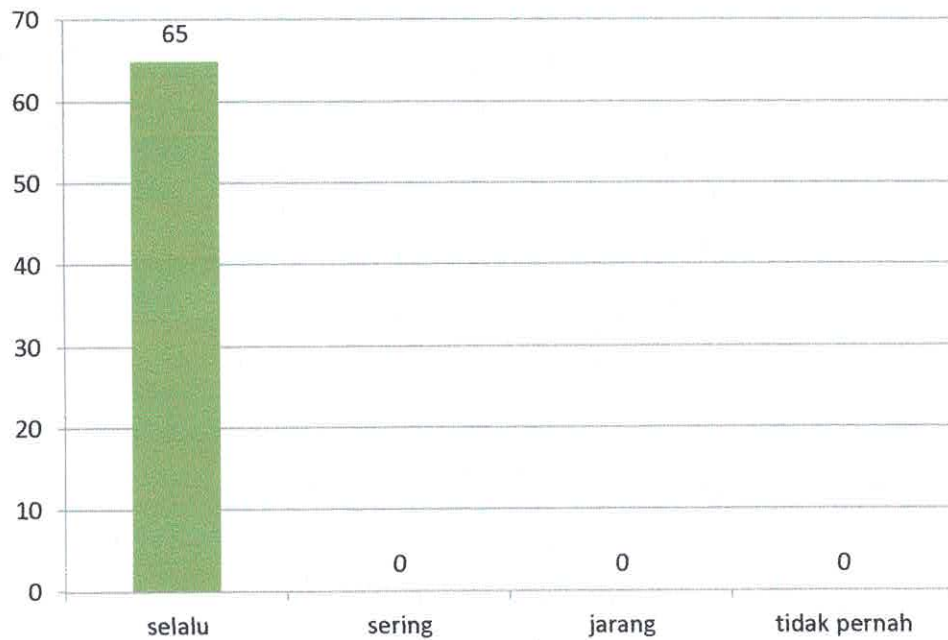
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 11
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	65	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 8



3.2.5

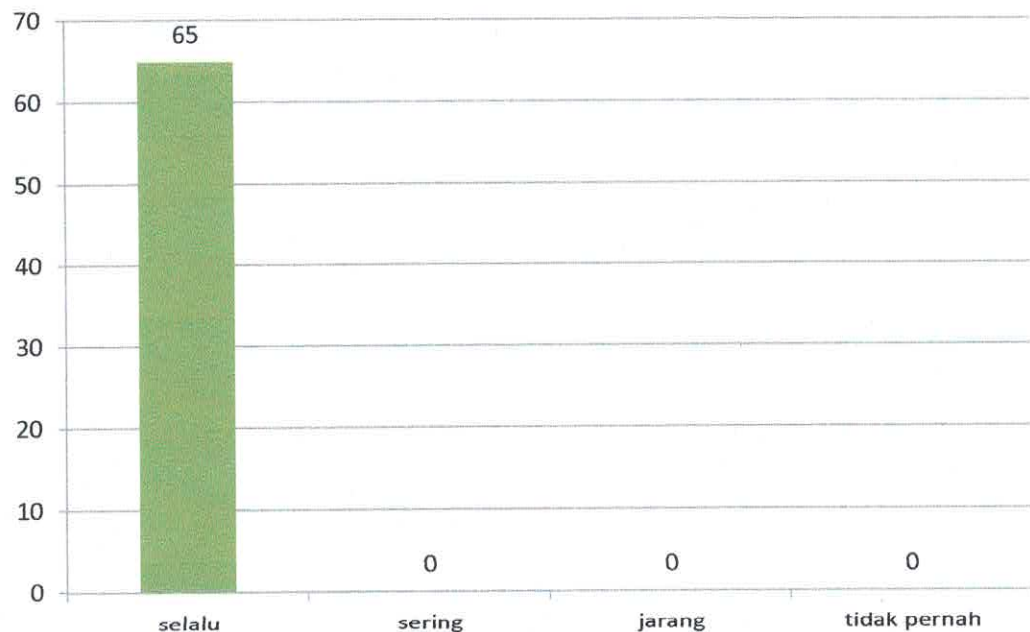
Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 12.
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	65	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 9



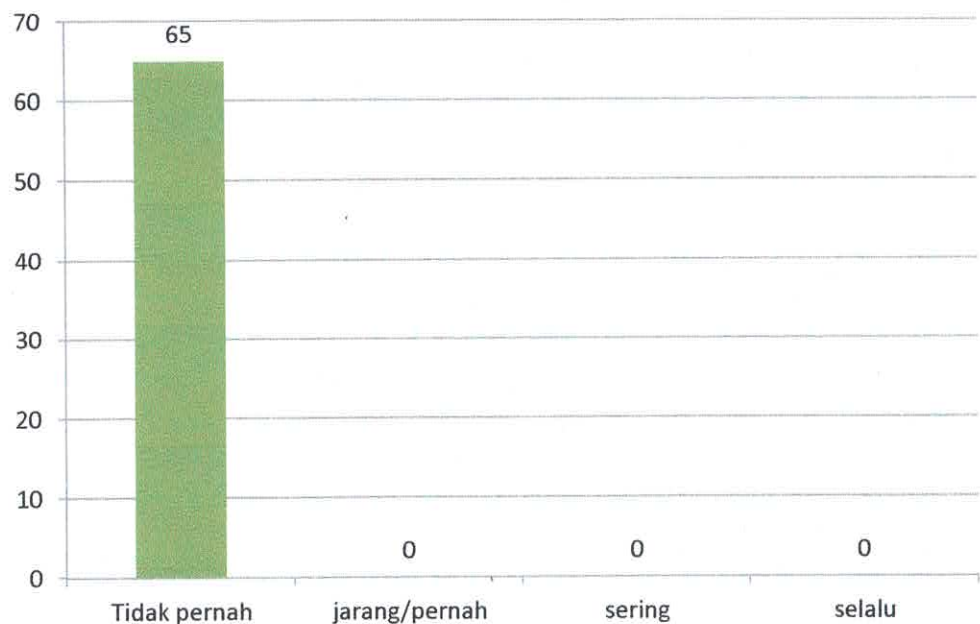
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 13
Indeks Pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	65	100
2	Sering	3	0	0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 10



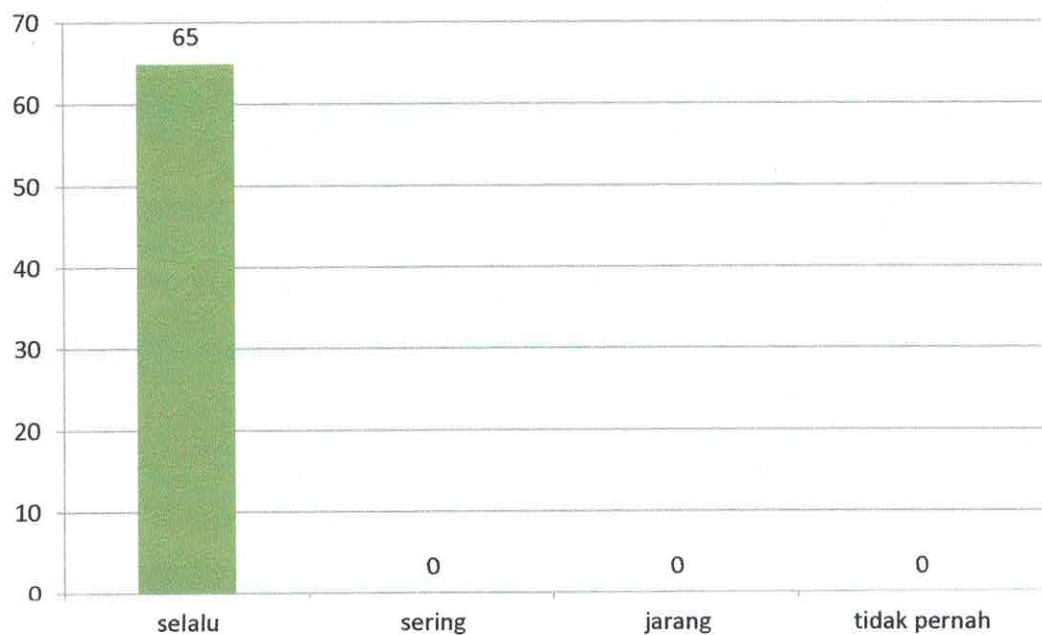
3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 14
Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	65	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 11



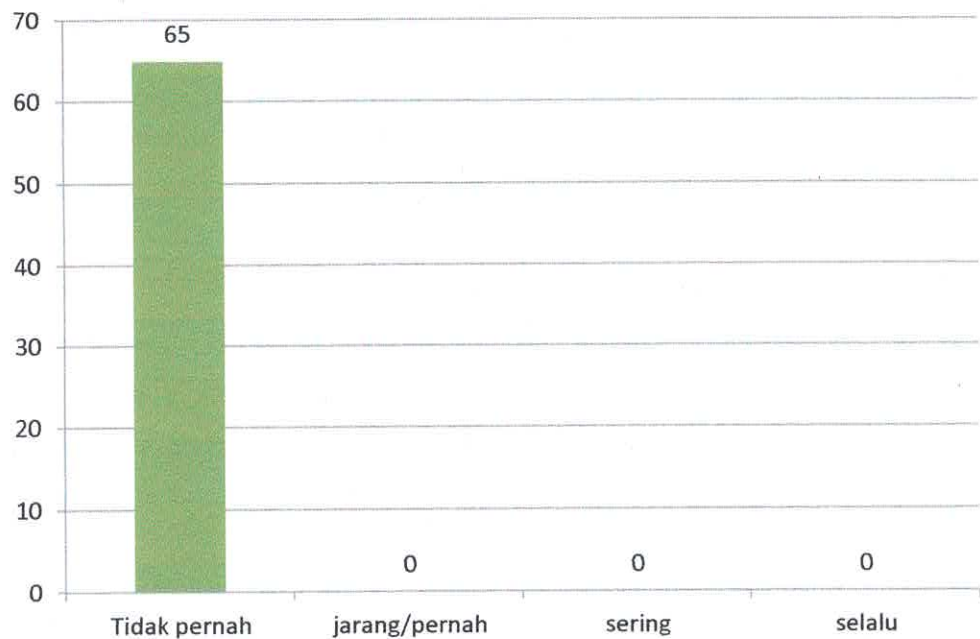
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **BERSIH DARI TINDAKAN PERCALOAN**.

Tabel.15
Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	65	100
2	jarang/pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 12



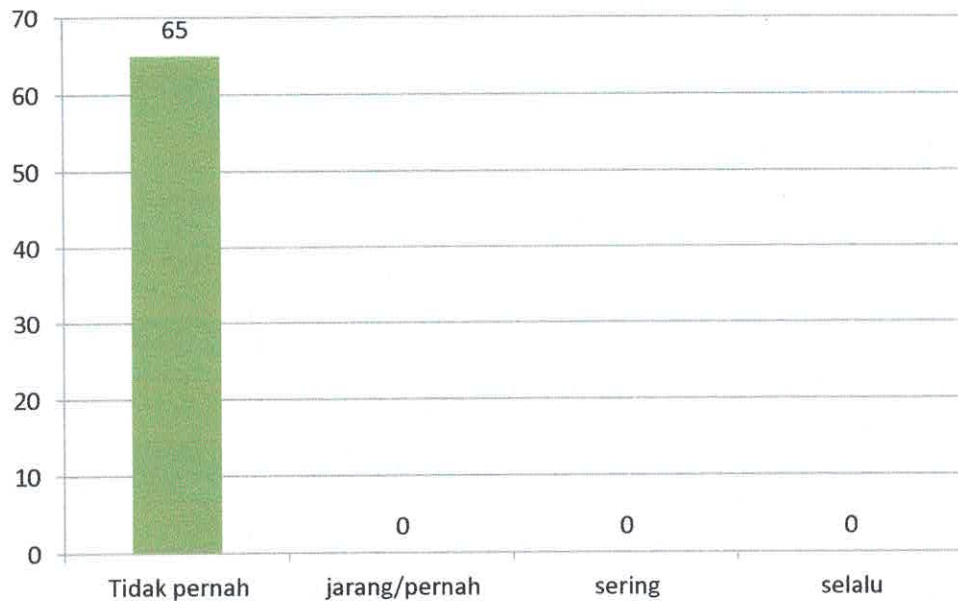
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 16
Tabel Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	65	100
2	jarang/pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 13



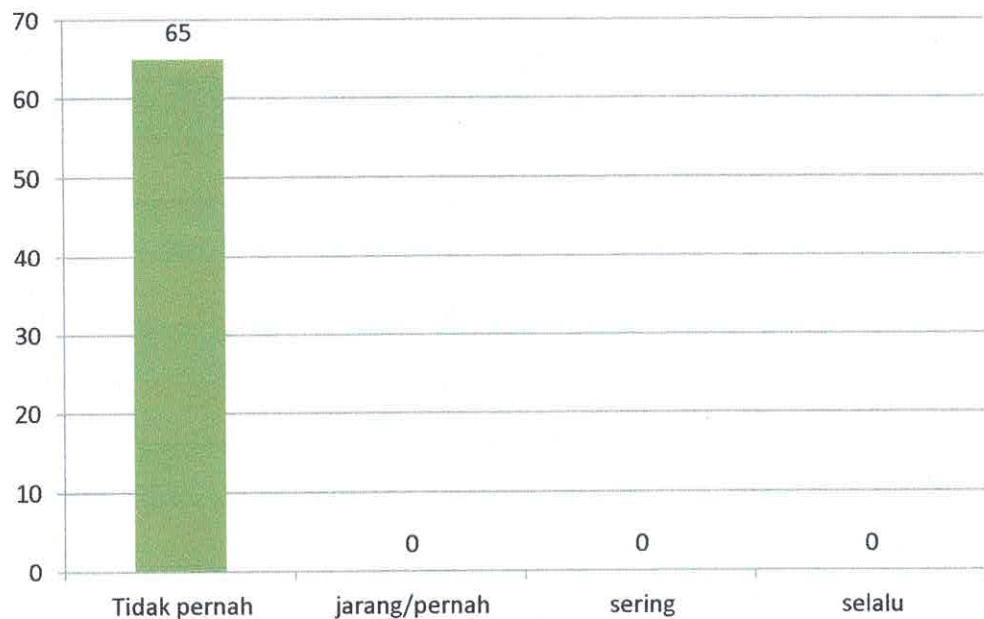
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang **SANGAT BAIK**.

Tabel. 16
Indeks Pada Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	65	100
2	Jarang/pehah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
Jumlah			65	100

Grafik. 14



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang sebesar **4.000**.

PEGOLAHAN DATA

Satuan kerja : Pengadilan Negeri Kepahiang
 Alamat : Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

*)

NRR Per Unsur

: Jumlah NRR IPK Tertimbang

: Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 4,000

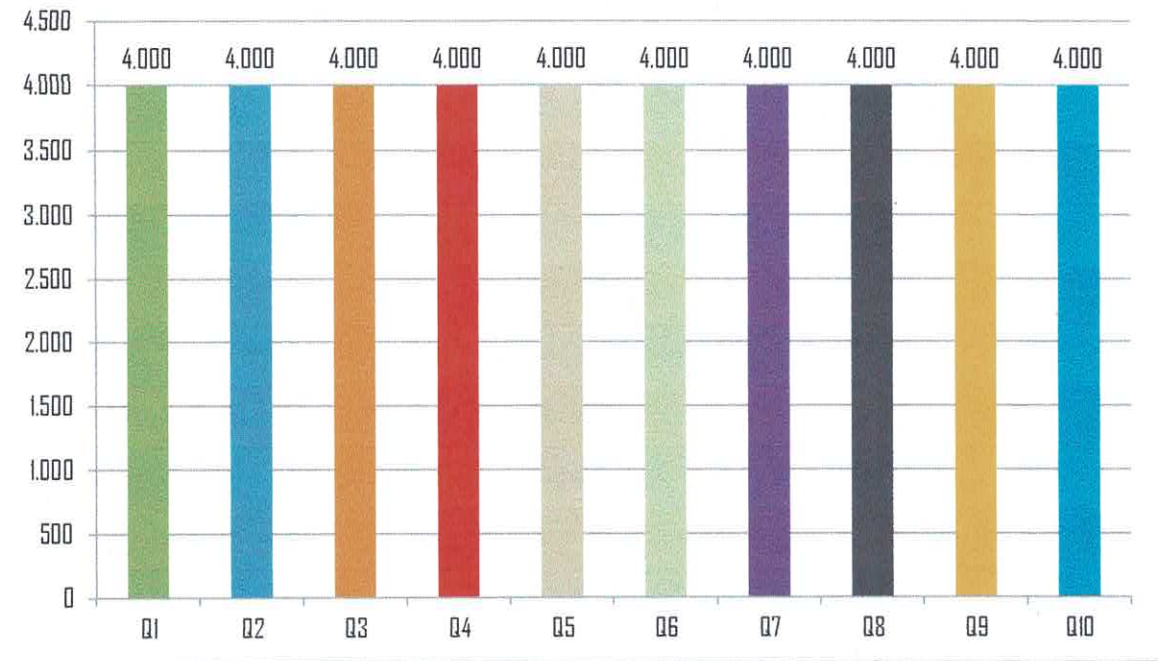
Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja/pilihan
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	D
1,76-2,50	43,76-62,50	2	C
2,51-3,25	62,51-81,25	3	B
3,26-4,00	81,26-100,00	4	A

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,000
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
Q 3	Menjual Pengaruh	4,000
Q 4	Transaksi biaya	4,000
Q 5	Biaya tambahan	4,000
Q 6	Hadiah	4,000
Q 7	Tranparansi Biaya	4,000
Q 8	Percaloan	4,000
Q 9	Perbuatan Curang	4,000
Q 10	Transaksi Rahasia	4,000

Tabel. 17

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang



Indeks **4.000** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.260 – 4.000.

Tabel. 18
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kepahiang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel. 19
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang
1	Semoga mendapatkan keadilan
2	Maju terus Pengadilan
3	Mantap
4	Sukses Melayani
5	Terus memberikan pelayanan prima
6	Semoga kerja sama selalu terjalin
7	Tegakkan keadilan walau langit runtuh

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kepahiang diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Kepahiang memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4.000** atau masuk pada kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**".

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Kepahiang Periode ke II Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **4.000** atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.